

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi adalah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai fasilitator dan melayani semua kegiatan dan kepentingan anggota DPRD. Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi memiliki salah satu misi sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008, yakni memfasilitasi ruang publik untuk penyampaian informasi DPRD dan aspirasi masyarakat. Dipertegas dalam Perwako Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 11 ayat 3 huruf f, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persidangan, Risalah dan Publikasi menerangkan bahwa salah satu tugas yang diberikan adalah menyusun bahan komunikasi dan publikasi (Peraturan Walikota Bukittinggi, 2021:8).

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota masuk ke dalam susunan organisasi, tugas dan fungsi tipe C yang terdiri atas tiga bagian dan dua sub bagian (Kemendagri, 2016: 5). Wawancara awal yang dilakukan dengan Yudy sebagai kasubag persidangan, risalah dan publikasi bahwasanya kegiatan publikasi di Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi memiliki beban struktural, keterbatasan komunikasi organisasi dan harus memilah informasi dan data yang akan dipublikasikan sehingga masalah yang muncul dalam publikasi adalah penyebarluasan atau distribusi informasi tidak dapat dilakukan dalam rentang waktu yang cepat sehingga mengalami keterlambatan.

Pengambilan sekretariat DPRD Bukittinggi sebagai lokasi penelitian disebabkan belum pernah dilakukan penelitian terkait komunikasi organisasi dan publikasi karena biasanya penelitian yang telah dilakukan berorientasi kepada peraturan daerah, lembaga legislatif dan politik anggota dewan namun hal yang menjadi tupoksi sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kebutuhan dewan belum terakomodasi dengan baik sehingga ini menjadi hal yang melatar belakangi peneliti memilih lokasi penelitian.

Komunikasi adalah sebuah jembatan penghubung dalam sebuah organisasi dalam menyamakan persepsi dan mencapai tujuan bersama. Pace & Faules (dalam Furqon, 2005: 3) menyatakan komunikasi organisasi adalah penyampaian pesan antar bagian atau unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hirarkis antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam satu lingkungan. Komunikasi organisasi terjadi akibat interaksi antar anggota organisasi yang saling bertukar informasi satu sama lain demi kebutuhan dan kepentingan organisasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan pertukaran pesan satu sama lain dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah sesuai dengan sifat organisasi yang dinamis. Organisasi terdiri dari sejumlah individu yang melibatkan keadaan saling tergantung, dalam pelaksanaan tugas dan ketergantungan memerlukan koordinasi dan koordinasi mensyaratkan komunikasi (Effendy, 2004: 116).

Sebuah organisasi memiliki pembagian antara pihak internal dan pihak eksternal. Menurut Rosady Ruslan (2006: 22) pihak internal adalah bagian atau unsur yang menjadi bagian dari organisasi yakni pegawai dan anggota organisasi. Sangat penting membina komunikasi dengan pihak internal dengan memberikan informasi pencapaian kinerja atau peningkatan kinerja



organisasi atau lembaga karena pihak internal ini yang akan bahu-membahu dalam mencapai tujuan organisasi dan juga akan menjadi cerminan bagi pihak eksternal dalam memberikan pandangan pada organisasi. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang berada di luar organisasi seperti masyarakat umum dan organisasi atau kelompok lain. Membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal sangat dibutuhkan karena organisasi tidak akan bisa bertahan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pihak eksternal memiliki perbedaan kepentingan terhadap organisasi misal kesempatan kerja, penambahan penghasilan, publik dan pers yang memiliki kepentingan terhadap peristiwa-peristiwa yang menyangkut organisasi dan sebagainya.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat disertai alur distribusi informasi yang cepat membuat munculnya era masyarakat informasi. Era ini ditandai dengan semakin tingginya tingkat kritis masyarakat dalam menerima dan menganalisa sebuah isu atau masalah yang muncul, khususnya di bidang pemerintahan yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dunia pemerintahan juga dituntut untuk terus berubah dan berkembang mengikuti zaman.

Dewasa ini berbagai pemerintahan hampir di seluruh dunia menerapkan konsep *good governance* yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan mengedepankan transparansi untuk menentukan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya (Agoes, 2011: 101). *Good governance* diterapkan di negara dunia ketiga (negara berkembang) untuk menghindari buruknya efektivitas pemerintahan dan menjadi sebuah keharusan bagi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *good governance* mengedepankan transparansi atau keterbukaan. Dengan adanya transparansi ini membuat masyarakat bisa ikut serta mengontrol jalannya roda pemerintahan. Transparansi ini dibuktikan dengan memberikan hak



kepada masyarakat untuk kemudahan memperoleh informasi, ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik, dan kebebasan berekspresi.

Menjamin hak masyarakat dalam kemudahan akses informasi kebijakan dan pelayanan publik, setiap lembaga pemerintahan wajib merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui segala informasi publik, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan peran aktif dalam pengambilan dan pengelolaan badan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan), mengetahui alasan kebijakan publik yang diambil, mengembangkan ilmu pengetahuan bangsa dan negara, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik sehingga menghasilkan layanan yang berkualitas (Kemenkumham RI, 2008:4).

Konsep *good governance* yang menekankan keterbukaan informasi publik dilakukan melalui publikasi. Secara harfiah publikasi berasal dari bahasa latin *publicatio* yang berarti pengumuman atau upaya menjadi umum. Publikasi dimaknai sebagai salah satu cara untuk mempengaruhi dan teknik penyampaian informasi yang mengandung nilai serta unsur-unsur berita yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian dan mendapatkan fokus dari masyarakat (Suhandang, 2012: 168). Publikasi berisikan segala hal tentang lembaga mulai dari profil, kiprah lembaga, kegiatan yang dilakukan, penghargaan yang didapatkan, dan hal lainnya yang masih terkait dengan lembaga tersebut.

Publikasi merupakan upaya komunikasi untuk dekat dengan masyarakat. Fokus utamanya adalah pemindahan pesan menyangkut bagaimana cara agar data atau fakta yang berupa informasi tersebut sampai kepada publik (Heryanto, n.d, 2013: 95). Publikasi dilakukan agar jalur

komunikasi dengan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Diharapkan munculnya umpan balik seperti saran, masukan dan kritik dari masyarakat terhadap kegiatan publikasi karena berarti informasi yang ingin disampaikan diterima oleh masyarakat sehingga muncul banyak respon. Kegiatan publikasi memiliki tujuan untuk menarik perhatian publik sehingga publik mengetahui keberadaan atau kehadiran individu, kelompok ataupun instansi.

Publikasi menjadi strategi mengedepankan informasi yang memiliki kedekatan (*proximity*) dan erat dengan masyarakat, penuh arti (*significance*), memiliki kemungkinan untuk terjadi (*possibility*) dan bersifat aktual (*actual*) kemudian dirangkum secara padat agar dapat diterima oleh masyarakat. Kemudahan dan kesederhanaan yang ditawarkan oleh publikasi namun dikelola dengan penuh kreativitas menghasilkan video press release yang menarik mata masyarakat, tulisan advertorial di media cetak, atau desain menarik dalam bentuk poster juga kolom di media cetak maupun baliho di pinggir jalan yang strategis yang kemudian menjadi poin plus dalam menarik perhatian.

Namun, publikasi juga membutuhkan peran serta dan kemampuan media dalam mentransmisikan pesan agar sampai kepada masyarakat. Media adalah alat atau sarana yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan atau publik (Cangara, 2014: 137). Maka publikasi yang telah dilakukan tidak akan sampai kepada masyarakat tanpa bantuan media. Menyadari pentingnya hal ini maka Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi melakukan kerja sama dengan beragam media.

Berdasarkan penelitian yang berjudul Aktivitas Publikasi Humas Terhadap Peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Kendari menyatakan bahwa sebanyak 16 responden atau 66,66% yang menyatakan Sangat Berdampak, dan sebanyak 5 responden atau 20,83% yang menyatakan Berdampak, 3 responden atau 12,5% menyatakan Kurang Berdampak, serta 0 responden atau 0%

yang menyatakan tidak Berdampak dan 0 atau 0% responden menyatakan Sangat Tidak Berdampak. Hasil ini menggambarkan bahwa publikasi memiliki dampak yang besar terhadap suatu lembaga (MS Wanto, MI Mattalitti, 2021:36). Relevansi yang didapatkan dari data tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan bahwa publikasi yang dilakukan memang berdampak positif terhadap kepentingan lembaga baik itu internal atau eksternal.

Perbedaan yang akan dirasakan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu menggunakan peranan humas, aktivitas humas, peningkatan kinerja, citra dan lainnya sedangkan penelitian yang akan dilakukan cenderung kepada komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dalam publikasi dengan menyebarkan informasi menggunakan media tanpa adanya bagian khusus seperti humas.

Berdasarkan pemaparan diatas dengan beban struktural organisasi, kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan terhambatnya program kerja yakni publikasi sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana komunikasi organisasi digunakan sebagai sarana dalam bertukar pesan dan informasi yang akan mempermudah tugas dan kinerja organisasi. Penelitian ini berjudul **“Komunikasi Organisasi Sekretariat Dalam Publikasi Fungsi Dan Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi Sebagai Lembaga Pemerintah”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini bagaimana komunikasi organisasi Sekretariat DPRD dalam mempublikasikan seluruh fungsi dan kegiatan dewan dan memanfaatkan beragam media?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan berjalannya proses komunikasi organisasi yang terjadi dalam publikasi aktivitas anggota dewan yang dilakukan Sekretariat DPRD.
2. Mendeskripsikan tahapan publikasi dan penyebarluasan informasi bagi pihak internal dan eksternal melalui media.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas komunikasi organisasi beserta fungsi dan kegiatan anggota DPRD serta peranan yang dilakukan oleh sekretariat DPRD dalam membantu seluruh tugas kedewanan dan terutama melakukan publikasi kepada masyarakat sebagai bentuk penyebaran informasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, khususnya studi mengenai komunikasi organisasi dan publikasi dalam dunia pemerintahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dalam evaluasi komunikasi organisasi baik internal dan eksternal dalam meningkatkan publikasi di masa yang akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan membantu sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dan lembaga pemerintahan terkait yang mengalami persoalan publikasi yang sama.

